

**MANAJEMEN PASCA BENCANA BANJIR OLEH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Anisa Dewi Sabrina

NPP. 32.0883

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [32.0883@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0883@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is motivated by the frequent and severe impact of flood disasters in Wajo Regency, South Sulawesi, which have not been optimally managed in the post-disaster phase. The problems addressed include the implementation of post-flood disaster management by the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the challenges encountered, and the appropriate strategies to overcome them. **Purpose:** The purpose of this study is identify and analyze the post-flood disaster management by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Wajo Regency.. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The theoretical framework applied is Soehatman Ramli's Post-Disaster Management Theory, which includes the dimensions of rehabilitation and reconstruction. **Result:** The findings indicate that the post-disaster management by BPBD Wajo still faces several obstacles, such as disharmony in inter-agency roles, limited budget, and insufficient human and infrastructure resources. Although rehabilitation and reconstruction efforts have been undertaken, their effectiveness still needs improvement. The recommended strategies include enhancing cross-sectoral coordination, strengthening institutional capacity, and actively involving the community in each recovery stage. **Conclusion:** The study concludes that effective, efficient, and sustainable post-disaster flood management in Wajo Regency requires an integrated and adaptive approach to ensure a successful recovery process. **Keywords:** Management, Post-Disaster, Flood*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingginya frekuensi dan dampak bencana banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang belum tertangani secara optimal dalam fase pasca bencana. Permasalahan yang dikaji meliputi pelaksanaan manajemen pasca bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang tepat dalam menanggulangnya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pasca bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Wajo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Manajemen Pasca Bencana menurut Soehatman Ramli, yang mencakup dimensi rehabilitasi dan rekonstruksi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pasca bencana oleh BPBD Kabupaten Wajo masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmonisasi tugas antar instansi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur.

Meskipun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pemulihan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan manajemen pasca bencana banjir membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif untuk menjamin proses pemulihan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pasca Bencana, Banjir

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, menjadikannya salah satu wilayah dengan potensi bencana alam yang sangat tinggi. Kombinasi antara kondisi geologis yang kompleks, iklim tropis dengan curah hujan tinggi, serta degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia menyebabkan berbagai jenis bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi, sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bencana yang paling sering melanda adalah banjir, terutama di wilayah dengan topografi dataran rendah dan sistem hidrologi yang tidak mampu mengalirkan air secara optimal.

Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana banjir, banjir ini sudah terjadi dari tahun 1983 sampai dengan sekarang khususnya di wilayah Kecamatan Tempe dan sekitarnya. Faktor-faktor seperti tingginya curah hujan, luapan Sungai Walanae, sedimentasi dari daerah hulu, dan posisi Danau Tempe yang berada diantara beberapa sungai sehingga aliran deras akibat curah hujan tinggi dapat memperparah kerentanan terhadap banjir sedangkan saluran pembuangannya hanya satu yaitu Sungai Cendranae yang bermuara di Teluk Bone (Ali dkk. 2023). Kejadian banjir besar seperti yang terjadi pada tahun 2020, serta kejadian serupa pada tahun 2024 yang merendam 28 desa di Kabupaten Wajo dan menyebabkan sekitar 23.009 korban jiwa dan 3.847 unit rumah yang terendam. Hal ini menunjukkan urgensi penanganan banjir secara komprehensif.

Pemerintah daerah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, telah mengimplementasikan berbagai strategi penanggulangan pasca bencana, termasuk pembangunan bendungan gerak di Kecamatan Tempe. Meskipun upaya ini membawa perubahan signifikan, kenyataannya bencana banjir masih terus terjadi secara berkala dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar.

Selain peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat juga sangat berperan untuk mendukung berjalannya program penanggulangan yang dilakukan BPBD. Partisipasi ini dapat berupa partisipasi pikiran, tenaga, keterampilan, serta partisipasi sosial (Ristiani, 2020).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan pasca bencana seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan penyaluran bantuan logistik saat tanggap darurat, namun kejadian banjir di Kabupaten Wajo tetap berulang dan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dari jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Wajo tahun 2021-2023 yang terus meningkat dan dampak yang ditimbulkan juga terus meningkat. Pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kejadian bencana banjir yang sebagian besar disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi (Reza dkk. 2023). Berikut adalah jumlah kejadian bencana di Kabupaten Wajo tahun 2021-2023:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023**

Tahun (1)	Bencana (2)	Jumlah Kejadian (3)	Dampak (4)
2021	Banjir	45	51.551 Korban Jiwa
			8.175 Unit Rumah Terdampak
			58 Unit Sarana Pendidikan
			30 Unit Tempat Ibadah
			25 Unit Sarana Kesehatan
			17 Unit Kantor
			2 Unit Pasar
	30 Unit Jembatan		
	Angin Puting Beliung	38	1.239 Korban Jiwa
			494 Unit Rumah Terdampak
2 Unit Sarana Pendidikan			
1 Unit Tempat Ibadah			
1 Unit Kantor			
Kebakaran	19	11 Korban	
		33 Unit Rumah Terdampak	
2022	Banjir	48	53.262 Korban Jiwa
			10.014 Unit Rumah Terdampak
			58 Unit Sarana Pendidikan
			31 Unit Tempat Ibadah
			17 Unit Sarana Kesehatan
			9 Unit Kantor
	Angin Puting Beliung	29	29 Unit Jembatan
			987 Korban Jiwa
			258 Unit Rumah Terdampak
			2 Unit Sarana Pendidikan
Kebakaran	15	1 Unit Tempat Ibadah	
		30 Unit Rumah Terdampak	
2023	Banjir	49	86.636 Korban Jiwa
			24.107 Unit Rumah Terdampak
			89 Unit Sarana Pendidikan
			62 Unit Tempat Ibadah
			59 Unit Sarana Kesehatan
			26 Unit Kantor
	Angin Puting Beliung	30	54 Unit Jembatan
			1.079 Korban Jiwa
			359 Unit Rumah Terdampak
			2 Unit Sarana Pendidikan
			2 Unit Tempat Ibadah
	Kebakaran	19	2 Unit Kantor
			66 Korban Jiwa
44 Unit Rumah Terdampak			

Sumber: BPBD Kabupaten Wajo (2024)

Belum banyak kajian yang secara khusus mengkaji efektivitas manajemen pasca bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Wajo, khususnya dalam konteks rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Ketiadaan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan penanggulangan banjir juga

menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya respons terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana strategi pasca bencana yang diterapkan oleh BPBD mampu menjawab tantangan banjir yang berulang di Kabupaten Wajo.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan manajemen pasca bencana. Penelitian Wahyuni dkk. (2022) yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara” menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai sudah cukup efektif namun masih ada beberapa indikator terkait rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca-bencana masih memerlukan waktu dan proses dikarenakan beberapa faktor penghambat salah satunya adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Penelitian Drajat (2022) yang berjudul “Analisis Penanggulangan Bencana Pasca Banjir di Kabupaten Luwu Utara” membahas terkait peran dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menanggulangi pasca bencana banjir bandang sehingga penelitian ini berfokus pada fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan fungsi pengaturan melalui BPBD Kabupaten Luwu Utara. Penelitian Atmaja dkk. (2024) yang berjudul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023” menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Karimun telah menerapkan strategi dalam penanggulangan bencana banjir namun terdapat beberapa program yang masih dalam tahap perencanaan dan sumber daya manusia masih kurang memadai. Penelitian Syazila & Mashur (2024) yang berjudul “Manajemen Pasca Bencana Abrasi di Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti” menjelaskan bahwa rencana pencegahan abrasi di Kepulauan Meranti telah ditetapkan sejak tahun 2006, namun masih terdapat kekurangan yang menyebabkan manajemen pasca bencana abrasi masih kurang optimal. Meski demikian, pemerintah setempat telah berhasil menurunkan laju abrasi setiap tahunnya. Penelitian Mahardika & Larasati (2018) yang berjudul “Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang” menjelaskan terkait proses manajemen penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang melalui beberapa tahapan yakni, perencanaan, pengorganisasian dan penggerak, pembiayaan, serta pengawasan. Penelitian Baehaqie dkk. (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon” menjelaskan bahwa peran pemerintah desa Gebang Ilir harus ditingkatkan khususnya dalam penanganan penanggulangan dan pemulihan bencana banjir. Peran yang dimaksudkan antara lain peran kebijakan, peran strategi, peran fasilitator, peran sebagai terapi, dan peran sebagai penyelesaian sengketa. Penelitian Akbar & Sundoyo (2022) yang berjudul “Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)” membahas tentang kajian kebutuhan pasca bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Post Disaster Need Assesment/PDNA*) yang didalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Penelitian Rahmah & Ikhsan (2022) yang berjudul “Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat” menjelaskan bahwa penanganan pasca bencana oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan sumber data yang didapatkan sehingga BPBD Kabupaten Aceh Barat perlu mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya dalam menangani pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian Erna dkk. (2024) yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali” menjelaskan bahwa efektivitas program

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di BPBD Kabupaten Pali menghadapi tantangan yang cukup signifikan seperti integrasi program yang kurang optimal dan sarana dan prasarana belum memadai sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Penelitian Mahmud (2023) yang berjudul “Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)” menjelaskan terkait bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan menemukan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini sehingga perlu adanya perbaikan terkait pelaksanaan program ini. Penelitian Karnaji dkk. (2023) yang berjudul “Social impacts and post-disaster management in disaster-prone areas of East Java, Indonesia” menjelaskan bahwa bencana memiliki berbagai implikasi terhadap kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga perlu adanya upaya untuk memerikan bantuan serta perlindungan sosial kepada korban bencana yang berkaitan dengan aktivitas mental, ekonomi, sosial, serta layanan kesehatan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian Penulis dilakukan di Kabupaten Wajo. Teori yang digunakan oleh Penulis menggunakan teori manajemen pasca bencana menurut Soehatman Ramli yang terdiri dari dua dimensi yaitu, rehabilitasi dan rekonstruksi (Ramli, 2010).

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pasca bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Wajo, untuk mengetahui faktor penghambat dan merumuskan strategi yang tepat untuk BPBD Kabupaten Wajo dalam manajemen pasca bencana banjir.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. penelitian kualitatif adalah proses untuk mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2022).

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan pengumpulan data kualitatif, Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada lima informan yang terdiri dari, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wajo, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Wajo, Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, Pegawai BPBD Kabupaten Wajo, dan Masyarakat yang terdampak bencana banjir. Proses pengumpulan data juga dilaksanakan dengan observasi secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori Manajemen Pasca Bencana oleh Soehatman Ramli (2010) yang menyatakan bahwa proses manajemen pasca bencana terdiri atas dua dimensi utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis manajemen pasca bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo menggunakan pendapat dari Soehatman Ramli yang menyatakan bahwa manajemen pasca bencana meliputi dua dimensi, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Manajemen Pasca Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Wajo**

Penelitian ini secara konseptual mengacu pada teori manajemen pasca bencana yang dikembangkan oleh Soehatman Ramli (2010), yang dijadikan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami berbagai langkah penanganan setelah terjadinya bencana. Teori ini menggarisbawahi dua aspek utama dalam proses manajemen pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, yang keduanya memiliki peran krusial dalam tahap pemulihan dan pembangunan pasca bencana.

Dalam hal rehabilitasi pasca bencana, BPBD melakukan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana, bantuan materiil, kesehatan dan lain sebagainya guna memulihkan lokasi terdampak bencana. Untuk rekonstruksi pasca bencana, BPBD melakukan proses kegiatan yang lebih terencana, tepat sasaran, dan tertib sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa mendatang (Heryati, 2020).

Aspek rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak agar dapat kembali berfungsi secara normal. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis warga terdampak. Sementara itu, aspek rekonstruksi mengarah pada pembangunan kembali secara menyeluruh dengan pendekatan jangka panjang dan berorientasi keberlanjutan. Rekonstruksi mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana di masa mendatang.

#### **3.1.1. Rehabilitasi**

Rehabilitasi pasca bencana mencakup beberapa sektor utama, yaitu:

1. Sektor Permukiman  
Pemulihan pada sektor permukiman mencakup perbaikan rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan permukiman dengan pemberian bantuan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan berdasarkan hasil kajian.
2. Sektor Infrastruktur  
Pemulihan infrastruktur publik meliputi perbaikan sarana seperti jalan, jembatan, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang terdampak.
3. Sektor Ekonomi  
Pemulihan di sektor ekonomi melibatkan penguatan kembali kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional, UMKM, sektor pertanian, dan industri perdagangan guna mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat.
4. Sektor Sosial  
Upaya pemulihan sosial difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk aspek psikologis, layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan.
5. Lintas Sektor  
Rehabilitasi lintas sektor dilakukan melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif antar sektor untuk pemulihan yang menyeluruh, seperti contohnya pemulihan fungsi-fungsi pemerintahan.

#### **3.1.2. Rekonstruksi**

Kegiatan rekonstruksi mencakup dua indikator utama, yaitu:

1. Rekonstruksi Fisik  
Merupakan proses pembangunan kembali infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, sekolah, serta fasilitas umum lainnya dengan desain yang lebih tahan terhadap potensi bencana.
2. Rekonstruksi Non-Fisik

Merupakan upaya pemulihan yang tidak berfokus pada pembangunan fisik, melainkan pada aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya. Bentuk kegiatan ini antara lain penataan kembali tata ruang guna mengurangi risiko bencana, penguatan sistem manajemen kebencanaan dan regulasi yang mendukung, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat agar tercipta ketangguhan wilayah, khususnya di Kabupaten Wajo.

Secara umum, rekonstruksi diarahkan untuk pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang, sementara rehabilitasi lebih berorientasi pada pemulihan kondisi dalam jangka pendek, yakni sampai situasi kembali normal seperti sebelum terjadinya bencana.

### **3.2. Faktor Penghambat**

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program manajemen pascabencana banjir di Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Kecenderungan kejadian bencana semakin meningkat  
Fenomena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta pertumbuhan wilayah perkotaan yang tidak terkendali berkontribusi terhadap semakin sering dan hebatnya kejadian banjir. Situasi ini menyulitkan pemerintah daerah untuk mengejar kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana yang terus berulang secara tidak terduga.
2. Masih Kepedulian masyarakat masih harus ditingkatkan  
Tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi pascabencana masih belum optimal. Minimnya pemahaman terhadap risiko bencana dan belum terbentuknya budaya tanggap bencana menyebabkan proses pemulihan berjalan lambat.
3. Kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana kabupaten/kota yang masih harus ditingkatkan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dan lembaga terkait lainnya masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, perencanaan, dan implementasi program pascabencana. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan teknologi.
4. Disharmonisasi tupoksi antara lembaga yang menangani penanggulangan bencana  
Kurangnya sinkronisasi dan kejelasan pembagian peran antar instansi terkait menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, sehingga menghambat efektivitas program pemulihan.
5. Kebijakan sektor yang kurang berorientasi kepada penanggulangan bencana  
Banyak kebijakan pembangunan di sektor tertentu belum mempertimbangkan aspek risiko bencana, seperti dalam perencanaan infrastruktur atau tata ruang, yang justru meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir.
6. Eksploitasi Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukungnya  
Kegiatan seperti pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, dan konversi lahan pertanian telah melemahkan kemampuan alam dalam menyerap air, memperparah potensi banjir, dan memperlambat proses rehabilitasi.
7. Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  
Dukungan anggaran yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan program pascabencana, khususnya dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi, yang berdampak pada keterlambatan serta keterbatasan dalam pelaksanaan.
8. Sarana dan prasarana yang terbatas

Kekurangan fasilitas dan peralatan operasional menghambat respons cepat di lapangan, baik dalam hal evakuasi, distribusi bantuan, maupun pemulihan infrastruktur yang terdampak.

9. Jumlah sumber daya manusia masih relatif terbatas serta kompetensi SDM bidang penanggulangan bencana masih belum memadai  
Jumlah tenaga kerja yang terbatas serta masih kurangnya kompetensi dalam bidang penanggulangan bencana menjadi kendala utama dalam menjalankan program pascabencana secara optimal. Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas memperburuk tantangan ini.

### 3.3. Strategi Manajemen Pasca Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Wajo

Pendekatan analisis yang tepat dalam merumuskan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan bencana adalah metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Dengan menyusun matriks SWOT, BPBD Kabupaten Wajo dapat merancang strategi penanggulangan banjir pascabencana secara lebih terarah, dengan mempertimbangkan potensi kekuatan yang dimiliki, mengatasi kelemahan internal, memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal, serta mengidentifikasi dan merespons berbagai ancaman yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah terdampak. Berikut adalah matriks strategi SWOT BPBD Kabupaten Wajo:

**Tabel 3.1**  
**Matriks Strategi SWOT**

	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<i>Opportunities</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama antar instansi berdasarkan pada regulasi yang sudah ada</li> <li>2. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program BPBD Kabupaten Wajo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama antar instansi untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir</li> <li>2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan</li> </ol>
<i>Threats</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi</li> <li>2. Pemberian peringatan dini melalui media sosial terkait potensi terjadinya bencana banjir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanggulangi disharmonisasi tupoksi antar instansi</li> <li>2. Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana banjir</li> </ol>

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus pada manajemen pasca bencana banjir dengan pendekatan teori Soehatman Ramli dengan dua dimensi utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini membedakan dengan penelitian Wahyuni dkk. (2022) yang lebih menekankan pada pengukuran efektivitas program pasca bencana menggunakan pendekatan kuantitatif dan *mixed method*. Sementara itu, Drajat (2022) lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, bukan pada manajemen pasca bencana secara menyeluruh. Penelitian Atmaja dkk. (2024) memiliki kesamaan dalam tahapan penanggulangan bencana, namun menggunakan teori strategi kelembagaan, bukan manajemen pasca bencana. Adapun penelitian Nur Syazila dan Dadang (2024) juga menggunakan pendekatan manajemen pasca bencana, tetapi pada konteks bencana abrasi, bukan banjir. Sedangkan Mahardika dan Larasati (2018) membahas manajemen bencana secara umum dari pra hingga pasca, menggunakan teori manajemen klasik, berbeda dengan fokus penelitian

Penulis yang membahas manajemen pasca bencana. Penelitian Baehaqie dkk. (2023) berfokus pada peran pemerintah desa dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana berbeda dengan penelitian Penulis yang berfokus pada BPBD Kabupaten Wajo. Penelitian Akbar & Sundoyo (2022) membahas terkait JITUPASNA dimana Penulis juga membahas terkait hal yang sama namun penelitian ini membahas lebih dalam lagi dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian Rahmah & Ikhsan (2022) menitikberatkan pada bagaimana penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam menangani bencana pasca kejadian dengan menggunakan metode yang sama dengan Penulis namun menggunakan teori yang berbeda yaitu teori manajemen bencana yang terdiri atas tiga tahapan yaitu: pra bencana; saat kejadian; dan pasca bencana. Penelitian Erna dkk. (2024) yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali” menjelaskan bahwa efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di BPBD Kabupaten Pali menghadapi tantangan yang cukup signifikan seperti integrasi program yang kurang optimal dan sarana dan prasarana belum memadai sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Penelitian Mahmud (2023) memfokuskan pada penerapan kebijakan terkait penanggulangan bencana dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian Karnaji dkk. (2023) menggunakan pendekatan *mixed method* dan membahas terkait wilayah rawan bencana serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di tiga wilayah rawan bencana di Jawa Timur.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai manajemen pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo, Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo dan dinas-dinas terkait termasuk diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana banjir.

Meskipun pelaksanaan manajemen pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa tantangan dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana. Beberapa masalah tersebut antara lain kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum memadai, sarana dan prasarana terbatas, serta pendanaan yang terbatas.

Melalui hal tersebut, diperlukan adanya strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Wajo. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, memastikan sarana dan prasarana dalam keadaan memadai dan lengkap, serta peningkatan anggaran. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BPBD Kabupaten Wajo dan instansi terkait guna untuk memastikan kegiatan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan sumber daya. Selain itu, adanya keterbatasan dalam mengakses data tertentu atau informasi yang membatasi pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian yang Penulis lakukan. Penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Sundoyo. (2022). Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian di Desa Tuana Tuha Kenohan). *JEMI*, 22(1).
- Ali, M., Aliah Ekawati, S., Akil, A., Arifin, M., Ihsan, Wahidah Osman, W., Dewi, Y. K., Rachman, A., Sastrawati, I., Valenti P, M., Veronica N, V., Muh Asfan Mujahid, L., Lakatupa, G., Wahyuni, S., Mandasari, J., Anugrah Yanti, S., Sagita Alfadin N, D., Fachrul Razy, M., & Sriwulandari, M. (2023). *Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo*. 6(1).
- Atmaja, S., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 2(4), 33–45.
- Baehaqie, M. A., Irfan, A., Abijaya, S., & Wildanu, E. (2023). Peran Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *SOSFILKOM*, 17(1).
- Drajat, Z. U. (2022). *Analisis Penanggulangan Bencana Pasca Banjir di Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Erna, Y., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali. *Journal of Law & Policy Review*, 2, 139–146. <https://mahesacenter.org/https://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/index>
- Heryati, S. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Karnaji, K., Susanti, E., Ariadi, S., & Saud, M. (2023). Social impacts and post-disaster management in disaster-prone areas of East Java, Indonesia. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/JAMBA.V16I1.1747>
- Mahardika, D., & Larasati, E. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2).
- Mahmud, M. (2023). Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala). *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 2, 77–83. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v2si.59>
- Rahmah, S., & Ikhsan. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1). <https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.776>
- Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Dian Rakyat.
- Reza, F. I., Surya, B., & Salim Rasyidi, E. (2023). Mitigasi Banjir Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. *Journal of Urban Planning Studies*, 3(2), 149–156.

- Ristiani, I. Y. (2020). MANAJEMEN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI POTENSI BENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 126–138. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Syazila, N., & Mashur, D. (2024). Manajemen Pasca Bencana Abrasi Di Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 141–150. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.161>
- Wahyuni, I., Azis, M. F., & Budiharto, T. (2022). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Urban and Regional Spatial*, 2(2), 198–207.

